

INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
SUMBER DANA : **APBD** Provinsi Sumatera Selatan
TRIWULAN : I6

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

FORM APBD

APBD Provinsi :

- a. Disampaikan Kepala Perangkat Daerah Provinsi kepada :
 - Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Bappeda provinsi
- b. Disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Kepada :
 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas RI
 - Menteri Keuangan RI
 - Menteri Dalam Negeri RI
 - Gubernur Sumatera Selatan dan Instansi terkait

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN APBN TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraann roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram dan tertib.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang mengemban tugas dan fungsi yang diatur dalam Perda No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mendukung visi **"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"**. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mendukung pelaksanaan **Misi 7** dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu "Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam Masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal". Dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

2. Sasaran

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang ditetapkan. Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran strategis satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

- a) Meningkatnya Kepatuhan / Kesadaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada;
- b) Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat ;
- c) Pemberdayaan Satlinmas;
- d) Mitigasi Daerah Rawan Kebakaran.

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN
 - a. Belanja Perangkat Daerah

Total Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBDP Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.39.912.533.897,-** yang terdiri atas :

Belanja Operasional	:Rp. 39.897.533.897,-
Belanja Pegawai	:Rp. 31.102.565.138,-
Belanja Barang dan Jasa	:Rp. 8.794.968.759,-
Belanja Modal	:Rp. 15.000.000,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:Rp. 15.000.000,-

- b. Program dan Anggaran APBD

Belanja Langsung tersebut terdiri atas 3 Program 10 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.168.621.397
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.400.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.400.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.361.165.138
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.102.565.138
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	202.100.000
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.500.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143.000.000
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000
9	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	85.000.000
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.000.000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.324.933

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.000.000
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384.324.933
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.058.428.826
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.948.826
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.806.480.000
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928.302.500
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	633.500.000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	284.802.500
22	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.383.055.000
VII	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.028.805.000
23	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	134.655.000
24	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	20.400.000
25	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	334.750.000
26	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	193.500.000
27	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	140.800.000
28	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	204.700.000
VIII	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	274.251.400
29	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	103.001.400

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2	3
30	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	118.000.000
31	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	53.250.000
IX	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	79.998.600
32	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	73.498.600
33	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	6.500.000
C	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	360.857.500
X	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	360.857.500
34	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	85.000.000
35	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	35.000.000
36	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	68.932.500
37	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	80.000.000
38	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	25.300.000
39	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	66.625.000
	TOTAL	39.912.533.897

c. Program dan Anggaran APBN

Sedangkan total pagu Anggaran Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2025 Sebesar **Rp. 0,-** (nihil).

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPD)

Sesuai dengan target yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera selatan Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas;
- Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal nya;
- Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda yang memperoleh layanan;
- Nilai SAKIP SatpolPP;

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Berdasarkan kewilayahan, Program / Kegiatan satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

❖ **Kota Palembang.**

Terdapat 25 Kegiatan yang dilaksanakan di kota Palembang antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
4. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Fasilitas Kunjungan Tamu;
9. Pengadaan Mebel;
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
14. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
15. Pencegahan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan;
16. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi;
17. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
18. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
19. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;
20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

❖ **Palembang dan Kab/Kota di Wilayah Sumsel dan Luar Daerah :**

Terdapat 23 kegiatan yang dilaksanakan di kab/kota di wilayah Sumsel, antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
5. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
9. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

11. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
12. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
13. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
14. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
15. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
16. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
17. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
18. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP);
20. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Operasi Penegakan Produk Hukum Daerah;
21. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga;
22. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.8/0351/Bappeda-V/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026 serta sebagai bahan masukan OPD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN IV INI

Hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I Ini pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut: **Rp. 39.912.533.897,-,-**

Tabel : Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Triwulan I (I)	Realisasi s.d. Triwulan I (I)	Target s.d. Triwulan I (I)	Realisasi s.d. Triwulan I (I)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	39.912.533.897,-	8.879.317.504,-	25	22,25	25	25,08
Belanja Operasional	39.897.533.897,-	8.879.317.504,-	25	22,25	25	25,08
- Belanja Pegawai	31.102.565.138,-	7.799.997.504,-	25	25,07	25	30
- Belanja Barang dan Jasa	8.794.968.759,-	1.079.320.000	25	12,27	25	25
Belanja Modal	15.000.000,-	0,-	25	0	25	0
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,-	0,-	25	0	25	0

a) Realisasi Pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan :

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.8.879.317.504,- atau 22,25% dan realisasi Fisik 25,08%.

2) Realisasi Belanja Operasional (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa)

Realisasi Keuangan Belanja Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.8.879.317.504,- atau 92,47% dan realisasi fisik 25,08%.

3) Realisasi Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)

Realisasi Keuangan Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.0,- atau 99,88% dan realisasi Fisik 0%.

b) Realisasi Keuangan

1) Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0-65% : 39 Sub Kegiatan.

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
9	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
23	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
24	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi
25	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
26	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
27	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
28	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
29	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
30	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
31	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
32	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
33	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
34	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
35	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
36	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
37	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan

	Kabupaten/Kota
38	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
39	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

2) *Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66-90% : 0 Sub Kegiatan.*

3) *Tinggi, Kegiatan dengan realisasi 90-100% : 0 Sub Kegiatan.*

c) Realisasi Fisik

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0 - 65 % : 39 Sub Kegiatan.
2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66-90% : 0 Sub Kegiatan.
3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi 90-100%: 0 Kegiatan.

2. Realisasi Pelaksanaan Program / Kegiatan APBN di Provinsi Sumatera Selatan :

K/L/Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
		Keuangan	Fisik
Kementerian Dalam Negeri RI			
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Keg. Pembinaan Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Nihil	Nihil	Nihil

a). Indikator Kinerja SKPD

- Indikator Kinerja SKPD berdasarkan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ;

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas	%	62,17%	0%	0%
2	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal nya	%	71,69%	0%	0%
3	Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda yang memperoleh layanan	Orang	2	0	0
4	Nilai SAKIP SatpolPP	Nilai	(A) 81	0	0

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Kendala :

- Perlu menunggu Kementerian Dalam Negeri dan BPS dalam rangka penyajian data indikator kinerja;
- Perlunya dukungan OPD pemangku Perda dan Perkada.

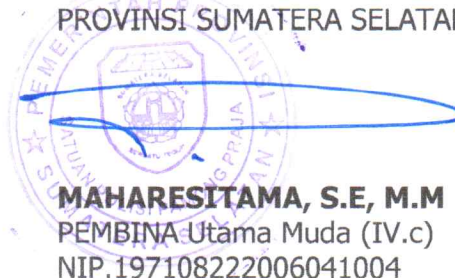
Saran dan Tindak lanjut :

- Perlunya dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

IV. PENUTUP

Demikianlah Penjelasan kami mengenai Program/Kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat di maklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, April 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



MAHARESITAMA, S.E, M.M
PEMBINA Utama Muda (IV.c)
NIP.197108222006041004